Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Caused By Law of Children's Law According to Law Number 23 Of 2002 Concerning Child Protection*

Adawiyah Nasution

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah,
Indonesia

Diterima: April 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019

*Corresponding Email: awierzy123@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis tentang ketentuan hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan untuk menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak. Disamping itu pula, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Hukum Islam dalam praktik hukum di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut, dilakukan penelitian dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan didukung penelitian lapangan di Mahkamah Pengadilan dan Kantor Catatan Sipil. Alat pengumpulan data primer adalah informan dengan pedoman wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif dalam bidang hukum. Dalam isi artikel ini menunjukkan bahwa, *pertama*, akibat hukum pengangkatan anak umumnya timbul dengan adanya penetapan pengadilan dengan tidak memutuskan nasib anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwaliannya. Dalam hal pewarisan, pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah. *Ketiga*, dengan adanya penetapan pengangkatan anak dari pengadilan maka konsekuensinya adalah perlindungan terhadap anak angkat dapat terjamin terhadap perwalian hukum maupun harta warisan dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak

Abstract

The purpose of this study is to assess the legal provisions of the children under Law No. 23 of 2002 and to explain the consequences of the child's adoption law. In addition, to know the legal protection of adopted children under the Child Protection Act is reviewed from Islamic Law Preformance law Practice in Indonesia. To examine the matter, a descriptive study was conducted with a normative juridical approach that was conducted only on the written rules. The collection of data is derived from the literature research and supported field research studies on the appointment of Court and Civil registry office. Primary data collection tools are informant with the interview guidelines whereas data analysis is done with a qualitative approach using the logical and inductive thinking logic in the field of law. In the content of this article shows that, firstly, the consequences of child adoption generally arise with the appointment of a court by not deciding the adoption of adopted children with their biological parents, which switching is the right of custody. In the case of inheritance, the appointment of children based on the determination of the Court of Justice is entitled to the inheritance of his adoptive parents based on wills. Thirdly, with the determination of the adoption of children from the courts, the consequence is the protection of adopted children can be assured of the custody of the law and the inheritance of its adoptive parents.

Keywords: Legal Consequences, Child Adoption, Child Protection

How to Cite: Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 14 - 26

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak - hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129: a) Pasal 11 menyatakan bahwa anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi. b) Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) bahwa anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Bila orang-orang yang kawin mengadopsi seorang anak laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka.

Berdasarkan Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berbunyi: ".....bahwa orang yang diadopsi, jika mempunyai nama keturunan lain daripada laki-laki yang mengadopsinya sebagai anak laki-lakinya memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi sebagai ganti dari pada nama keturunan orang yang diadopsi."

Akibat hukum dengan terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya maka anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkatnya termasuk memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutupi hak waris saudara kandung dan hak waris orang tua kandung dari orang tua angkatnya.

Pasal 14 menyatakan suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bunyi Pasal 14 Stb 1917 No. 129 menyatakan: "karena suatu adopsi maka gugurlah hubungan keperdataan yang terjadi karena keturunan alamiah antara orang tua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap: a) Derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk kawin; b) Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan kepada keturunan alamiah, c) Perhitungan (kompensasi) dari biaya perkara dan penyanderaan, d) Pembuktian dengan saksi-saksi, e) Bertindaknya sebagai saksi pada akta-akta otentik

Selanjutnya Pasal 15 menyatakan: adopsi tidak dapat dihapuskan oleh saling persetujuan dari kedua pihak, bisa dibatalkan dengan sepakat para pihak, a) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain dari pada dengan akta notaries adalah batal demi hukum, b) Adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 5,6,7,8,9 atau ayat (2) dan (3) Pasal 10.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Perluasan disini dimaksudkan bahwa pemeliharaan

anak atau *hadhanah* tidak hanya kepada anak kandung sendiri tetapi juga anak orang lain yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Status pemeliharaan (*hadhanah*) tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga pengasuhnya bahwa anak angkat tetap bernasab kepada keluarga asalnya dan anak angkat memperoleh haknya sebagaimana hak anak pada umumnya.

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah *hadhanah* yang diperluas. Anak asuh yang diperluas karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.

Hukum Islam hanya membenarkan perubahan dibidang pemeliharaan, tanggung jawab, pengawasan dan pendidikan. Perubahan status keluarga, hubungan nasab dan sejenisnya jelas dilarang artinya akibat hukum pengangkatan anak tidak mengalami perubahan status hubungan keluarga, yang ada hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Anak angkat tetap berhubungan dengan keluarga asalnya demikian juga orang tua angkat tetap berhubungan nasab dengan keluarga asalnya. Hubungan nasab dimaksudkan adanya hubungan darah

Karena tidak ada hubungan nasab maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram dan keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw diperintahkan untuk mengawini janda dari anak angkatnya, Zaid Bin Haritsah. Hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad saw dengan Zaid Bin Haristah tidak ada hubungan nasab kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dan anak angkatnya (Mahjuddin, 2003).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu memelihara anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Berbicara tentang anak angkat berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, hal ini telah dijawab di dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pengangkatan anak telah di atur di dalam Pasal 171 huruf h yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengangkatan anak itu sendiri tidak diatur dalam Hukum Islam dan dengan kehadiran Kompilasi hukum Islam yang mengatur masalah pengangkatan anak memberikan pencerahan kepada ummat Islam khususnya yang ingin melakukan pengangkatan anak karena pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat muslim hanya dilakukan secara diam-diam.

Yang menjadi latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat dengan KHI adalah dilatar belakangi pada pengkajian dari para ulama Indonesia, diantaranya Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional yang mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari hukum Islam. Pokok pikiran tersebut anatara lain: a) Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi

kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua; b) Perlu diadakannya pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak; c) Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain; d) Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandung; e) Hubungan kekayaan/harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat; f) Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam; g) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat; h) Tidak dapat dibenarkan pengangkatan anak oleh orang yang agamanya berlainan (Soeroso, 1993)

Kehadiran KHI di tengah-tengah masyarakat Indonesia merupakan suatu fakta bahwa masyarakat muslim di Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sebenarnya sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 diberlakukan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 juncto *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada *dictum* pemerintah dinyatakan seluruh lingkungan instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan lebih lanjut diatur pada Surat Edaran Direktur Pembinaan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 3894/FV/HK.003/AZ/91 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama diseluruh Indonesia tentang

penyebarluasan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki persamaan dengan akibat hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum barat bahwa dengan masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua yang mengangkatnya maka terputuslah hubungan keluarga orang tua kandung dengan anak yang di angkat. Perbedaannya, dalam hukum adat disyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung dari anak angkat – biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 11 Stb. 1917 Nomor 129 yang menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan orang yang diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya. Selanjutnya Pasal 14, menyatakan adopsi karena hukum menyebabkan putusya hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Di dalam hukum adat tidak terdapat tidak ada keseragaman. Ada daerah yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya sendiri dan ada daerah yang tidak. Misalnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu di daerah ini dikenal istilah “air dari dua sumur” tetapi dalam masyarakat dengan system kekerabatannya patrilineal misalnya pada masyarakat Batak, maka pengangkatan anak ini menyebabkan putusya hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya dan anak yang bersangkutan memakai nama keluarga (marga) orang tua angkatnya.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Keadan tersebut apabila diterapkan pada

masyarakat Batak maka seorang anak angkat dapat mempunyai 2 (dua) marga yang berbeda yaitu marga orang tua angkatnya dan marga orang tua kandungnya. Berarti pengaturan menurut Hukum Adat Batak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi jika disesuaikan dalam pelaksanaannya, apakah pengangkatan anak menggunakan hukum adat setempat atau Perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyinggung hal tersebut menjelaskan bahwa apabila pengangkatan anak yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Meliala, 2006).

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat.

Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan keturunan maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka adat atau penghulu yang dilakukan secara terang karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalayak ramai (Muhammad, 1981).

Pencatatan Anak Angkat Dalam Catatan Sipil

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Pada pembahasan di atas, telah diuraikan bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya.

Tidak dapat diandaikan seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir ditengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Maka akta kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur dengan sendirinya setelah ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maslia Lubis, S.E, mengenai syarat-syarat mengajukan akte kelahiran anak adopsi di Kantor Catatan Sipil adalah sebagai berikut: 1) Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum; 2) Akte kelahiran anak tersebut; 3) Surat keterangan Lurah; 4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Rumah Tangga orang tua yang mengangkat anak dan telah dilegalisir dari lurah; 5) Akte perkawinan orang tua yang menyangkut anak tersebut (Hasil wawancara dengan

Maslia Lubis, SE, Pegawai bidang Pelayanan Kelahiran/Kematian pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal wawancara 21 Juni 2010)

Langkah yang perlu ditawarkan sehubungan dengan kemungkinan pencatatan anak angkat yang telah ditetapkan Pengadilan Agama adalah membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak, bahwa anak yang bersangkutan sekarang ini telah menjadi anak angkat A dan B misalnya, hak dan kewajiban pemeliharaan anak telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga karena akibat hukum dari pengangkatan anak akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas maka pencatatannya di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran anak angkat.

Persoalan menjadi agak rumit, apabila anak yang diangkat tidak mempunyai asal usul orang tua yang jelas, misalnya anak yang diangkat mulanya dalam keadaan mengenaskan ditemukan ditempat pembuangan sampah atau dipinggir jalan atau ditempat lain yang sengaja ditaruh orang tua kandungnya dengan harapan dapat diasuh oleh orang lain.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu keluarga yang hendak mengangkat anak

yang tidak diketahui asal usulnya maka pengangkatan anak dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama khusus orang tua angkat yang beragama Islam. Tata cara bagi masyarakat yang beragama Islam yang akan mengangkat anak temuan menjadi anak angkatnya haruslah terlebih dahulu mengurus penetapan Pengadilan Agama tentang penetapan perwalian bagi anak tersebut karena dalam agama Islam tidak dibenarkan memutuskan nasab seseorang anak dengan orang tua kandungnya.

Sebagai penjelasan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa akte kelahiran merupakan salah satu bukti otentik mengenai asal usul seorang anak tapi khusus bagi anak yang tidak diketahui asal usul dan tidak diketahui orang tuanya maka anak tersebut dapat ditetapkan walinya melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama khusus bagi anak yang akan diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan akurat sehingga anak tersebut tetap mempunyai kejelasan akan orang tua yang bertanggung jawab menjadi pengasuh atau wali dalam hidup dan kehidupan yang baik dan benar.

Apabila anak yang diangkat diambil dari panti asuhan atau yayasan, seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahirannya sehingga dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan maka orang tua angkat mengajukan permohonan "*catatan pinggir*" pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.

Apabila anak yang dimohonkan sebagai anak angkat itu tidak jelas asal usulnya karena pada saat diambil dalam keadaan mengenaskan atau karena dibuang oleh orang tuanya maka terhadap orang yang menemukannya melaporkan kasus penemuan bayi itu ke pihak kepolisian. Kepolisian akan membuatkan

surat keterangan penemuan bayi dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan surat keterangan dari kepolisian itu pihak yang menemukan bayi dapat mengajukan permohonan pencatatan ke kantor catatan sipil untuk dikeluarkan akta kelahirannya. Setelah diperoleh kutipan akte kelahiran maka selanjutnya akan ditempuh oleh calon orang tua angkatnya dengan mengajukan permohonan pengangkat anak ke pengadilan di wilayah domisili pemohon.

Perwalian Terhadap Anak Angkat

Berdasarkan pengertian etimologis, perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.

Umumnya masalah perwalian anak diatur pada Bab VII Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 33 memberikan ketentuan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu.

Perwalian terhadap anak angkat dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Maka, orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab perwalian terhadap anak angkatnya termasuk perwalian

terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu, jika anak angkat telah dewasa maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya itu.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Lembaga tersebut bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Jika wali meninggal dunia maka ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, wewenang perwalian mengenai masalah pribadi maupun harta benda bagi seorang anak kecil laki-laki akan berakhir apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun dan terlihat tanda-tanda balighnya secara alami dan cerdas. Adapun untuk anak kecil perempuan, hak walinya akan berakhir apabila ia telah kawin, jika ia belum kawin, maka ia tetap berada dalam perwalian sampai ia mampu berdiri sendiri. Namun ulama mazhab Hanafi tidak memberikan batasan umur yang tegas terhadap anak perempuan.

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, apabila dia akan menikah maka yang bisa

menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarah (saudara kandungnya).

Hak Waris Terhadap Anak Angkat

Dalam khazanah hukum di Indonesia baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiga hukum tersebut memiliki kekuatan yang sama artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Apabila menggunakan lembaga hukum adat, penentuan warisan bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental misalnya suku Jawa, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali kekeluargaan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, ada kemungkinan dia juga tetap berhak memperoleh pembagian warisan dari orang tua kandungnya.

Berbeda dengan adat di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (Buddiarto, 1991).

Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali (perwalian) dan hubungan pembagian warisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (Buddiarto, 1991).

Dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dan dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris dari orang tua

angkatnya pula. Artinya, akibat dari pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara terminologi, wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta tersebut berbentuk materi maupun berupa manfaat. Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil aqal (Al-Jalidi, tt).

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah suatu tindakan yang bersifat ikhtariah yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dan dalam keadaan bagaimanapun penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat (Rahman, 1987).

Kewajiban wasiat bagi seseorang adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta benda yang belum dilaksanakan sendiri oleh orang yang berwasiat semasa ia masih hidup, maka wasiat itu wajib dilaksanakan dengan ketentuan agama bukan dengan keputusan atau ketetapan hakim. Namun demikian, penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai hak dan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan wasiat atau memberikan surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan istilah "wasiat wajibah" kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

Di Indonesia tampaknya banyak dipengaruhi oleh factor lain dalam memberikan bagian warisan kepada cucu yatim lewat representasi (yang sangat terkenal bagi kalangan ahli hukum Indonesia dengan istilah Belanda "*plaats vervulling*"), yaitu keputusan yang diambil

dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan hukum yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasikan cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum adat atau diangkat tanpa ada upacara adat dan juga tanpa ada penetapan dari pengadilan. Apakah anak angkat tersebut diakui sebagai anak angkat dan dapat pula memperoleh bagian wasiat wajibah seperti yang tersebut dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam ini sering dilakukan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang berada di daerah pedesaan, dimana pada masyarakat tersebut tidak memahami adanya ketentuan tentang wasiat wajibah, yang memberikan hak kepada anak angkat dan atau orang tua angkat atas harta peninggalan dari orang tua angkat/anak angkat dan pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan penetapan pengadilan.

Pada masyarakat hukum adat terdapat pelaksanaan konsep bahwa seorang anak angkat tetap dalam keluarga asal tetapi semua biaya keperluan si anak ditanggung oleh orang lain yang telah menganggapnya sebagai anak angkat dan masyarakat sekitarnya telah mengakui bahwa orang yang menanggung

keperluannya tersebut sebagai orang tua angkatnya

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta warisan (Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, 1994/1995). Hal ini disebabkan karena anak angkat dan orang tua angkat tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan pewaris, maka reformasi yang revolusioner ini harus mengesampingkan prinsip yang sudah ada dalam kewarisan Islam yaitu bahwa hubungan darah adalah syarat sah bagi pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sedemikian rupa mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk memperbolehkan anak angkat untuk mewarisi secara sah harta warisan pewaris yaitu orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan orang tua angkat tersebut mempunyai hak yang sah untuk menjadi penerima wasiat wajibah sehingga Kompilasi Hukum Islam melihat hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat sangat dekat dan kata "kerabat dekat (*al-aqrabin*)" dalam ayat tentang wasiat dapat diterjemahkan sebagai hubungan anak angkat dan orang tua angkat.

Wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah dianggap telah terjadi wasiat antara anak angkat dan orang tua angkat. Pada dasarnya ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam masih disosialisasikan. Pemerintah ingin melihat apakah aturan wasiat wajibah ini diterima oleh masyarakat muslim Indonesia. Apabila diterima maka akan ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih kuat lagi kekuatan hukumnya.

Syariat Islam tidak membenarkan memberi warisan kepada anak angkat

sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Oleh karenanya anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, maka mereka hanya dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.

Motivasi dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan, hal ini disebabkan karena tidak adil rasanya apabila hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya yang selama ini berjalan dengan baik tetapi setelah meninggalnya salah satu diantara mereka, hubungan ini dirasakan terputus karena tidak sedikitpun harta yang didapatkan dari hubungan baik tersebut dan pada akhirnya membawa dampak buruk misalnya rasa sakit hati dan sebagainya.

Istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 1995), yang isinya sebagai berikut: Ayat (1): harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2): terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi Pasal 209 KHI ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah

kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan (Ali, 1997).

Maka keberadaan wasiat wajibah dalam KHI hanyalah berdasarkan kemaslahatan artinya atas dasar pertimbangan kemaslahatan antara orang tua angkat dengan anak angkat diciptakan dalam wasiat wajibah ini.

Berikut ini salah satu bentuk penerapan dari penetapan ahli waris dalam hal pembagian harta warisan sehubungan dengan adanya kedudukan anak angkat. Berdasarkan kewenangan di Pengadilan Agama Medan, memeriksa dan mengadili perkara perdata Tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan pengadilan Nomor 40/Pdt.P/2006/PA.Mdn dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari: 1) Pemohon I, nama Zulfikar SH bin Abdul Rivai, pekerjaan Notaris; 2) Pemohon II, nama Prof. Drs. Husni Rasyid bin H. Rasyidin, pekerjaan dosen.

Di samping bertindak untuk kepentingan diri sendiri juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa: a) Hj. Ratna Sari binti H. Rasyidin, pekerjaan pensiunan PNS, pemohon III; b) Hj. Nuraini binti H. Rasyidin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemohon IV; c) Djunimar binti H. Rasyidin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemohon V; d) Risman bin H. Rasyidin, pekerjaan Swasta, pemohon VI; e) Hasnah binti H. Rasyidin, pekerjaan PNS, pemohon VII; f) DR. Ir. H. Azwar Rasyidin binti H. Rasyidin, pekerjaan Dosen, pemohon VIII; g) Fazrina Azinar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemohon IX.

Menimbang: bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Medan, yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah saudara kandung dari almarhumah Faizah yang selanjutnya disingkat Almh dan pemohon II sampai dengan VIII adalah saudara kandung almarhum R. Azinar yang selanjutnya disingkat Alm, sedangkan pemohon IX adalah anak angkat dari Almh dan Alm.
2. Almh. Faizah telah meninggal dunia di Medan tahun 1995.
3. Ayah kandung Almh. Faizah bernama Abdul Rivai telah meninggal tahun 1983 dan ibu kandungnya bernama Firuzah, juga telah meninggal tahun 1985.
4. Bahwa Almh semasa hidupnya telah menikah dengan R. Azinar yang telah meninggal dunia tahun 2006 tetapi tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa almh mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung diantaranya 6 (enam) orang saudara kandungnya telah meninggal dunia sedangkan 1 (satu) orang bernama Zulfikar SH, masih hidup.
6. Bahwa ketika meninggalnya almh, ahli waris yang hidup adalah seorang suami bernama R. Azinar dan satu orang saudara kandung laki-laki bernama Zulfikar SH (Pemohon I) dan menurut Hukum Islam, R. Azinar dan pemohon I adalah ahli waris yang mustahaq yang berhak atas harta peninggalan Almh.
7. Bahwa Alm. R. Azinar telah meninggal dunia di Medan karena sakit.
8. Bahwa ayah kandung alm bernama H. Rasyidin telah meninggal dunia tahun 1975 dan ibu kandungnya Hj. Hindun juga telah meninggal dunia tahun 1995.
9. Bahwa Alm semasa hidupnya telah menikah dengan almh. Faizah dan tidak mempunyai keturunan.
10. Bahwa alm mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yang

semuanya masih hidup dan selain itu tidak ada lagi ahli waris dari alm.

11. Bahwa dengan demikian ketika alm meninggal tahun 2006, ahli waris yang mustahaq yang berhak atas harta peninggalan alm.
12. Bahwa almh Faizah dan alm. R. Azinar tahun 1972 telah mengangkat satu orang anak perempuan yaitu pemohon IX.

Menimbang: bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut: 1) Fotocopy kartu penduduk; 2) Fotocopy Surat keterangan kematian; 3) Fotocopy Surat pernyataan ahli waris; 4) Fotocopy Kartu keluarga

Bahwa alat-alat bukti tersebut telah di nazzegel dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Medan.

Menimbang: bahwa para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan setelah membaca surat permohonan pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti di atas, maka dapat ditemukan fakta-faktanya.

Menimbang: bahwa dengan demikian ahli waris dari alm R. Azinar adalah 7 (tujuh) orang saudara kandung yang nama-namanya tersebut diatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 182 KHI sedangkan terhadap anak angkatnya mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan almh Faizah dan alm. R. Azinar.

Menimbang: bahwa dengan demikian ahli waris dari almh Faizah adalah seorang suami bernama R. Azinar dan seorang saudara kandung bernama Zulfikar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 179 KHI, sedangkan terhadap anak angkatnya bernama Fazrina Azinar mendapat wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya dalam hal ini almh. Faizah.

Menimbang: bahwa dengan demikian ahli waris dari alm R. Azinar adalah 7 (tujuh) orang saudara kandung

yang nama-namanya tersebut diatas. Hal ini sejalan dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 182 KHI sedangkan terhadap anak angkatnya bernama Fazrina Azinar mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya yaitu alm. R. Azinar. Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Menimbang: bahwa karena harta yang dibagi adalah harta bersama maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 96 ayat (1) KHI terhadap harta yang akan dibagi tersebut bagian almh. Faizah $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian dari alm.R. Azinar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang selengkapanya. Dan terhadap anak angkatnya Fazrina Azinar masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari masing-masing harta almh Faizah dan alm R. Azinar.

Menetapkan: ahli waris yang mustahq dari almh Faizah dan alm. R. Azinar dan menetapkan anak angkat bernama Fazrina Azinar memperoleh wasiat wajibah dari harta peninggalan almh. Faizah dan harta peninggalan alm. R. Azinar.

Sesuai dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dalam praktek telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Medan antara lain dengan penetapan pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2006/PA.Mdn tertanggal 8 Agustus 2006 dalam perkara permohonan penetapan ahli waris.

Penerapan lembaga hukum wasiat wajibah dalam kasus sengketa anak angkat dan ahli waris beda agama di Indonesia merupakan perkembangan hukum baru. Khusus mengenai ahli waris beda agama yang diberikan harta warisan melalui lembaga wasiat wajibah harus melalui berbagai pertimbangan hukum yang mendalam sehingga antara kasus yang satu dengan yang lainnya tidak selalu memiliki hukum terapan yang sama.

Pemberian berupa wasiat saja kepada ahli waris harus mendapat persetujuan

ahli waris lainnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada hak wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkannya (Sabiq, 1998).

Konsep wasiat wajibah mulanya hanya diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris karena adanya suatu halangan *syara*. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non Islam.

Konsep ini lahir sebagai kebijakan penguasa terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan wasiat sedangkan ia mempunyai harta peninggalan yang banyak, artinya kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat *qadhaiyah* dalam pengertian kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan kepada ada atau tidak adanya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya tetapi kepada hukum yang berlaku sehingga meskipun seseorang tidak berwasiat semasa hidupnya secara langsung dianggap berwasiat (Al jalidi, 2003).

Dari pendapat inilah kemudian lahir istilah wasiat wajibah yang oleh Suparman Usman mendefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi dari kehendak orang yang meninggal dunia, wasiat ini tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat wajibah tidak memerlukan bukti bahwa wasiat itu dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat itu harus dilaksanakan (Usman, 1997)

SIMPULAN

Akibat hukum pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan disejajarkan kedudukan hukumnya dengan

anak kandung dari orang tua angkatnya. Secara hukum anak angkat mempunyai nama keturunan dari orang yang mengangkatnya dan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Menurut Hukum Adat, akibat hukum pengangkatan anak berbeda-beda, Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan atau putusan pengadilan dengan tidak memutuskan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang beralih adalah hak perwalian atas anak tersebut. Dalam hal pewarisan, anak angkat yang telah mendapat putusan atau penetapan pengadilan berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahjuddin, (2003). *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Soeroso, R. (1993). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, D.S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, B. (1981). *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Buddiarto, M. (1991). *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, 1991*. AKAPRESS, Jakarta, hal. 11.
- Al-Jalidi, S.M. (tth.). *ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Kulliyatu Da'wah Islamiyah),
- Rahman, F. (1987). *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma Arif, Bandung.
- Departemen Agama RI, (1994/1995). *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo.
- Ali, M.D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Putusan Pengadilan Agama Medan, dilaksanakan di Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Mei 2006.
- Sabiq, S. (1998). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif.
- Usman, S. (1997). *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.